

# Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Nur Azizah Siregar<sup>a</sup>, Khairul Amri<sup>b\*</sup>, M. Haris Riyaldi<sup>c</sup>

<sup>a,b\*</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

<sup>c</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

## ABSTRACT

This research article reviews the role of local government spending in moderating the relationship between zakat receipts and poverty in 23 districts / cities in Aceh province for the 2009-2018 period. The type of data in this study is secondary data in the form of panel data, namely a combination of time series data and cross section data. Sources of data were obtained from BPS Aceh, Baitul Mal Aceh and the Regional Government processed by the Regional Financial Data Sub-Directorate, Directorate of EPIKD from 2009-2018. The method of research analysis was carried out using panel data regression analysis and MRA to examine the effect of zakat and regional spending on poverty reduction and to examine the role of regional spending in moderating the relationship between zakat and poverty in Aceh Province. The results showed; (1) zakat has a negative and significant effect on poverty reduction; (2) BPD has a negative and significant effect on poverty reduction; (3) MDR is negative and not significant to the relationship between zakat and poverty, which means that BPD is only an independent variable but not a moderating variable on the relationship between zakat and poverty.

## ABSTRAK

Artikel penelitian ini mengulas tentang peran belanja pemerintah daerah dalam memoderasi hubungan penerimaan zakat dengan kemiskinan di 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh periode 2009-2018. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yaitu gabungan data time series dan data cross section. Sumber data diperoleh dari BPS Aceh, Baitul Mal Aceh dan Pemerintah Daerah yang diolah oleh Subdit Data Keuangan Daerah Direktorat EPIKD tahun 2009-2018. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dan MRA untuk menguji pengaruh zakat dan belanja daerah terhadap pengentasan kemiskinan serta untuk menguji peran belanja daerah dalam memoderasi hubungan zakat dan kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasilnya menunjukkan; (1) zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan; (2) BPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan; (3) MDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan zakat dengan kemiskinan, artinya BPD hanya merupakan variabel independen namun bukan merupakan variabel moderasi terhadap hubungan zakat dan kemiskinan.

## ARTICLE HISTORY

Received 11 June 2023  
Accepted 5 November 2023  
Published 30 November 2023

## KEYWORDS

Poverty; Receipt of Zakat; Local Government Spending; Regression Moderation Analysis.

## KATA KUNCI

Kemiskinan; Penerimaan Zakat; Belanja Pemerintah Daerah; Analisis Moderasi Regresi.

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, melainkan salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kemiskinan merupakan masalah besar yang sudah ada sejak lama, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan.

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan yang sedang terjadi. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dimana Indonesia menempati peringkat kesembilan dalam daftar negara dengan jumlah orang

miskin terbesar di dunia. Sedangkan Aceh merupakan peringkat yang pertama penduduk miskin di bagian Sumatera dan posisi keenam di seluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, dan Gorontalo. Aceh yang memiliki 23 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Kemiskinan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang tidak memadai.

Kemiskinan yang menjadi persoalan utama sebenarnya dapat diatasi dengan optimalisasi penerapan zakat. Persoalan kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia khususnya Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli yang relatif rendah karena ketimpangan pembangunan manusia yang tidak merata. Zakat menjadi solusi dalam persoalan kemiskinan dengan cara saling gotong-royong dan saling membantu antara sesama manusia. Dalam hal ini berdasarkan Al-quran, hadits dan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana ekonomi yaitu kemiskinan dan kelangkaan suatu barang. Dalam ekonomi Islam disebut sebagai alat pengentasan kemiskinan dalam bentuk distribusi pendapatan. Media yang digunakan untuk mengelola dana zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat. Lembaga zakat merupakan sarana pengelola distribusi kekayaan yang memiliki kewajiban kolektif terhadap perekonomian umat Islam.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih tampak kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar. Zakat berperan strategis dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi umat, sehingga Islam sebagai rahmatan lil'alamiin benar-benar dapat dirasakan. Namun tampaknya antara idealitas tersebut masih jauh dari realitas yang ada. Padahal jika zakat benar-benar dikelola dengan manajemen yang profesional akan berdampak positif untuk mengantisipasi permasalahan sosial. Dengan menunaikan zakat akan dapat mengembalikan kemuliaan manusia yaitu dengan membebaskan manusia dari penghambaan atas harta dan membebaskan perbudakan manusia dengan cara membebaskan ikatan perhambaan dan memurnikan dari bukti-bukti kehambaan yang ada tersebut (Inayah, 2003).

Selain daripada zakat, maka belanja daerah juga dianggap sebagai pengentas kemiskinan. Dimana dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. Investasi yang dilaksanakan pemerintah melalui belanja modal berkontribusi pada perekonomian regional, setidaknya dalam dua tahap yaitu, dalam jangka pendek melalui belanja material dan penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka panjang melalui angka pengganda pada sektor swasta yang turut berperan dalam perekonomian. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik

diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan ekonomi.

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat maka perlu dikeluarkannya kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin tercapainya pembangunan ekonomi secara menyeluruh termasuk kestabilan dan keadilan. Suatu kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah adalah kebijakan fiskal. Dalam anggaran ini terdapat rencana pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh dan dibayarkan oleh pemerintah selama setahun. Pendapatan yang diterima dalam perekonomian modern berupa penerimaan pajak. Dalam Islam jenis penerimaan yang sudah ada salah satunya adalah penerimaan Zakat. Sedangkan pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah ada dalam bentuk cash atau ada juga yang melalui mekanisme pengadaan barang/jasa.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia yang berasal dari Baitul Mal Aceh, BPS dan Laporan Keuangan Pemerintah yang telah dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) selama periode tahun 2009-2018 dan silang (*cross section*) 23 kabupaten kota di Aceh. Kemiskinan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah rasio jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di daerah tertentu pada periode tahun tertentu yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya zakat yang dimaksudkan adalah realisasi penyaluran zakat pada daerah tertentu dalam periode tahun tertentu yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kapita. Terakhir, belanja pemerintah adalah realisasi belanja pemerintah daerah tertentu dalam periode waktu tertentu yang dihitung dengan satuan ribu rupiah per kapita.

Guna menganalisis pengaruh zakat dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan, model analisis yang digunakan adalah regresi panel. Selanjutnya untuk menguji sejauhmana keberadaan belanja pemerintah memoderasi pengaruh penyaluran zakat terhadap kemiskinan digunakan *moderated regression analysis (MRA)*. serta *MRA*. Dengan pemilihan estimasi melakukan pengujian *Chow-test* dan *Housman-test*. Secara ekonometrik model regresi panel yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan dengan zakat dan belanja pemerintah yang diformulasikan dalam persamaan 1.

$$MSK_{it} = \beta_0 + \beta_1 ZKT_{it} + \beta_2 BPD_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana:

$\beta_0$  : Konstanta

$MSK_{it}$  : Kemiskinan di kabupaten/kota  $i$  pada tahun  $t$

$ZKT_{it}$  : Realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota  $i$  pada tahun  $t$

$BPD_{it}$  : Relisasi belanja pemerintah di kabupaten/kota  $i$  pada tahun  $t$

$\beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi  $ZKT_{it}$  dan  $BPD_{it}$

$i$  : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)

$t$  : Tahun (2009, 2012, ..., 2018)

$e$  : Error term.

Mengingat masing-masing variabel memiliki ukuran berbeda, diperlukan adanya proses transformasi data dalam bentuk logaritma, sehingga persamaan 1 tersebut dimodifikasi menjadi persamaan 2.

$$LMSK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LZKT_{it} + \beta_2 LBDP_{it} + e_{it} \tag{2}$$

Dimana:

- $\beta_0$  : Konstanta
- $LMSK_{it}$  : Logaritma kemiskinan di kabupaten/kota i pada periode t
- $LZKT_{it}$  : Logaritma realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada periode t
- $LBDP_{it}$  : Logaritma realisasi belanja pemerintah di kabupaten/kota i pada periode t
- $\beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi  $LZKT_{it}$  dan  $LBDP_{it}$
- i : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)
- t : Tahun (2009, 2012, ..., 2018)
- e : Error term.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian ini juga menempatkan BPD sebagai variabel pemoderasi antara penerimaan zakat dan kemiskinan. Keberadaan moderating variable dalam hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih berimplikasi bahwa model analisis yang digunakan adalah moderated regression analysis (MRA). MRA dapat menganalisis pengaruh moderating variable dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Sehingga persamaan 2 dimodifikasi menjadi MRA seperti ditunjukkan dalam persamaan 3.

$$LMSK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LZKT_{it} + \beta_2 LBDP_{it} + \beta_3 MDR_{it} + e_{it} \tag{3}$$

Dimana:

- $\beta_0$  : Konstanta
- $LMSK_{it}$  : Logaritma kemiskinan di kabupaten/kota i pada periode t
- $LZKT_{it}$  : Logaritma realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada periode t
- $LBDP_{it}$  : Logaritma realisasi belanja pemerintah di kabupaten/kota i pada periode t
- $MDR_{it}$  : Perkalian antara  $LZKT_{it}$  dan  $LBDP_{it}$
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi  $LZKT_{it}, LBDP_{it}$  dan  $MDR_{it}$
- i : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)
- t : Tahun (2009, 2012, ..., 2018)
- e : Error term.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pemilihan Model Estimasi Berdasarkan Hasil Uji Chow-Test dan Housman-Test pada Regresi Panel dan MRA

Uji *Chow* disebut juga sebagai uji *Redudant Fix Effect* atau *Likelihood Ration*. Uji ini dilakukan untuk menentukan diantara *Common Effect Model* dan *Fix Effect*, model terbaik manakah yang dapat digunakan. Sedangkan Uji *Housman* dilakukan untuk menentukan diantara *Fix Effect Model* dan *Random Effect Model* manakah yang lebih baik untuk digunakan.

Tabel 1. Hasil *Chow Test* Regresi Panel dan MRA

<i>Hasil Chow Test</i> Regresi Panel			
Uji Efek	Statistic	Df	p-value
Cross-section F	110.157,676	(22,205)	0,000
Cross-section Chi-square	586.763,763	22	0,000
<i>Hasil Chow Test</i> MRA			
Uji Efek	Statistic	Df	p-value
Cross-section F	112.897,736	(22,204)	0,000
Cross-section Chi-square	593.018,147	22	0,000

Sumber: Data diolah, 2020.

Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai *p-value cross section F* sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ), baik untuk regresi panel maupun MRA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Chow-Test*, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil *Hausman Test* Regresi Panel dan MRA

Hasil <i>Housman Test</i> Regresi Panel			
Uji Efek	X <sup>2</sup> -Statistic	Df	<i>p-value</i>
<i>Cross-section Random Effect</i>	10,249	2	0,005
Hasil <i>Hausman Test</i> MRA			
Uji Efek	X <sup>2</sup> -Statistic	Df	<i>p-value</i>
<i>Cross-section Random Effect</i>	8,870	3	0,031

Sumber: Data diolah, 2020.

Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai *p-value Hausman-Test* untuk regresi panel sebesar 0,005 ( $< 0,05$ ), sedangkan nilai *p-value Hausman-Test* untuk regresi MRA sebesar 0,031 ( $< 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik bila dibandingkan dengan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil uji *Chow-Test* dan *Housman-Test* dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Fixed Effect Model* menghasilkan estimasi yang lebih akurat bila dibandingkan dengan pendekatan *Random Effect Model*. Oleh karena itu, regresi panel dan MRA yang dipilih dan kemudian digunakan untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam hal ini uji multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* hasil regresi panel dan MRA dengan nilai koefisien korelasi (*r*) antara sesama *predictor variable*. Dalam model regresi panel, *predictor variable* terdiri dari zakat (LZKT<sub>it</sub>) dan belanja pemerintah daerah (LBPD<sub>it</sub>). Selanjutnya dalam MRA menambahkan variabel moderasi (MDR<sub>it</sub>) sebagai *predictor variable* ketiga selain dua variabel tersebut. Koefisien korelasi antar ketiga variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Koefisien Korelasi antar Variabel dan *Adjusted-R<sup>2</sup>* Regresi Panel dan MRA

Variabel Penelitian	LMSK <sub>it</sub>	LZKT <sub>it</sub>	LBPD <sub>it</sub>	MDR <sub>it</sub>
LMSK <sub>it</sub>	1,000			
LZKT <sub>it</sub>	-0,228	1,000		
LBPD <sub>it</sub>	-0,026	0,524	1,000	
MDR <sub>it</sub>	-0,032	0,572	0,649	1,000
Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted-R<sup>2</sup></i> )				
Hasil Regresi Panel: 0,9393				
Hasil MRA : 0,9392				

Sumber: Data diolah, 2020.

Tabel 3 menunjukkan koefisien korelasi (*r*) antara penerimaan zakat (LZKT<sub>it</sub>) dan belanja pemerintah daerah (LBPD<sub>it</sub>) sebesar 0,524. Selanjutnya koefisien korelasi antara *moderating variable* (MDR<sub>it</sub>) dengan penerimaan zakat dan belanja pemerintah daerah masing-masing sebesar 0,572 dan 0,649. Angka ini lebih kecil dari nilai *Adjusted-R<sup>2</sup>* hasil regresi panel dan MRA sebesar 0,9393 dan 0,9392. Hal ini berarti bahwa model regresi panel dan MRA yang digunakan untuk memprediksi kemiskinan di Aceh terbebas dari gejala multikolinieritas.

### 3.3 Hasil Regresi Panel dan MRA dari Estimasi Fixed Effect Model

Uji kriteria statistik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji t (parsial) dan moderasi. Berikut adalah tabel ringkasan hasil dari estimasi *Fixed Effect Model* yaitu:

Tabel 4. Hasil Regresi Panel dari Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value	Keterangan
C	4,993	0,141	35,371	0,000	
LZKT	-0,022	0,008	-2,810	0,005	Signifikan
LBDP	-0,138	0,012	-11,099	0,000	Signifikan

$R^2 = 0,945$   
 Adjusted  $R^2 = 0,939$   
 F-statistic = 148,810  
 Prob(F-test) = 0,000  
 Durbin-Watson test = 1,286

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4 yang memaparkan hasil dari pengolahan data regresi panel dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* dengan perolehan hasil bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. Dengan nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,05 < 0,005$  dan nilai koefisiennya sebesar -0,022. Sedangkan BPD juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. Dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu  $0,05 < 0,000$  yang memiliki nilai koefien sebesar -0,138.

Tabel 5. Hasil Regresi MRA dari Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value	Keterangan
C	4,927	0,168	29,266	0,000	
LZKT	-0,020	0,008	-2,256	0,025	Signifikan
LBDP	-0,135	0,012	-10,501	0,000	signifikan
MDR	-2,640	3,630	-0,727	0,467	Tidak Signifikan

$R^2 = 0,945$   
 Adjusted  $R^2 = 0,939$   
 F-statistic = 142,552  
 Prob(F-test) = 0,000  
 Durbin-Watson test = 1,307

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 5 yang memaparkan hasil dari pengolahan data MRA dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* dengan hasil bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. Dengan nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,05 < 0,025$  dan nilai koefisiennya sebesar -0,020. Dalam hal ini BPD juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. Dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu  $0,05 < 0,000$  yang memiliki nilai koefien sebesar -0,135. Sedangkan moderasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara moderasi terhadap hubungan zakat dan kemiskinan. Hal ini yang berarti terdapat interaksi negatif antara penerimaan zakat dan BPD dalam mempengaruhi kemiskinan di Aceh. Nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,05 > 0,467$  dan nilai koefisiennya sebesar -2,64.

### 3.4 Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Zakat ini dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat

merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Dalam penelitian ini pengaruh penerimaan zakat dalam regresi panel dan MRA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. Dimana penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Mohamed et al (2019) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara zakat terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, penelitian dari Khasandy dan Badrudin (2019) yang menemukan bahwa zakat tidak mampu menurunkan kemiskinan. Kemiskinan yang ada pada masyarakat tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah menerima zakat.

### 3.5 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini adalah belanja langsung di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak serta merta dapat menurunkan tingkat kemiskinan walaupun pengeluaran pemerintah berupa belanja langsung tetapi penyerapannya tidak efektif pada program- program yang produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Salah satu yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Aceh dengan melalui Belanja Pemerintah. Sedangkan pengaruh BPD dalam regresi panel dan juga MRA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sholehah (2017) yang menemukan bahwa BPD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, dkk (2017) menemukan hasil bahwa BPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

### 3.6 Efek Moderasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Hubungan Zakat dan Kemiskinan di Provinsi Aceh

Pengaruh moderasi dalam hubungan zakat dan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Hal ini menyatakan bahwa BPD hanya sebagai variabel independen (prediktor) tetapi tidak sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan zakat dan kemiskinan. Dengan kata lain, efek moderasi yang ditimbulkan oleh BPD adalah prediktor moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*). Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5 regresi MRA bahwa koefisien estimasi variabel moderasi ( $MDR_{it}$ ) bernilai negatif, yang artinya terdapat interaksi negatif antara penerimaan zakat dan BPD dalam mempengaruhi kemiskinan di Aceh. Dengan kata lain, BPD memperkecil efek negatif penyaluran zakat terhadap kemiskinan. Secara statistik, penurunan efek negatif tersebut dapat dilihat dari perbandingan koefisien estimasi penerimaan zakat terhadap kemiskinan antara sebelum dan setelah menempatkan BPD sebagai variabel moderasi. Dimana nilai koefisien estimasi penerimaan zakat terhadap kemiskinan sebelum adanya variabel moderasi sebesar -0,022 (persamaan 1). Hal ini berarti bahwa setiap 1 persen peningkatan dana zakat mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,022 persen. Selanjutnya dengan menempatkan BPD sebagai variabel moderasi maka koefisien estimasi penerimaan zakat menurun menjadi sebesar -0,020 (persamaan 2) yang berarti peningkatan dana zakat sebesar 1 persen berdampak pada penurunan kemiskinan sebesar 0,020 persen. Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Muliadi dan Amri (2019) yang menemukan bahwa BPD tidak hanya

sebagai variabel independen tetapi sebagai variabel pemoderasi antara hubungan penerimaan zakat dengan kemiskinan di Aceh dengan efek moderasi yang ditimbulkan oleh BPD dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kemiskinan adalah quasi moderasi.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerimaan zakat per kapita dalam regresi panel dan juga MRA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan yang ada di Aceh; (2) Belanja pemerintah daerah per kapita dalam regresi panel dan MRA juga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh; (3) sedangkan Moderasi dalam regresi MRA memiliki nilai yang negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara zakat dengan kemiskinan di Aceh. Ini diartikan bahwa keberadaan BPD hanya sebagai variabel independen tetapi tidak sebagai variabel pemoderasi antara hubungan zakat dengan kemiskinan di Aceh. efek moderasi yang ditimbulkan oleh BPD adalah prediktor moderasi (Predictor Moderasi Variabel).

Dengan keterbatasan penelitian ini diharapkan agenda mendatang agar dapat menguji kembali variabel-variabel lain, serta menambahkan periode pada penelitian yang akan lebih meningkatkan penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan untuk mensejahterakan masyarakat, maka disarankan bagi Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dengan baik diantaranya dengan menjaga afektivitas pendistribusian zakat, sehingga peran zakat dalam mengatasi kemiskinan dapat lebih meningkat di masa yang akan datang. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh agar dapat lebih meningkatkan Belanja Daerah yang ada di Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

#### Referensi

- Abimanyu, & Anggito. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekri Depkeu.
- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 64-71.
- Adnan, K., & Adnan, G. (2020). Pemberdayaan gender, pendapatan perempuan dan penurunan kemiskinan: Bukti data panel dari kawasan barat Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 37-56.
- Al-Qardawi, Y. (2002). Zakat Role in curing Social and Economic Malaises. In M. Kahf (Ed.), *Economics of Zakat* (pp. xx-xx). IRTI-IDB, Jeddah.
- Amri, K. (2019). Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 7(2), 57-70.
- Asahdi, et al. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 65-73.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2003). *Data Informasi Kemiskinan*. BPS: Jakarta.

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh.
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Pekbis Jurnal*, 8(1), 1-13.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129-136.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press: Jakarta.
- Haryana, A. (2005). Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan. Retrieved from [bappenas.go.id](http://bappenas.go.id).
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 67-84.
- Inayah & Gazi. (2003). Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. PT. Tiara Wacana.
- Jundi, M. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The influence of zakat on economic growth and welfare society in Indonesia. *Integrated Journal of Business and Economics*, 65-79. doi:10.33019/ijbe.v3i1.89.
- Mardiana, et al. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50-60.
- Mohamed, A. S. B., Ibrahim, A. A. B., Zaidi, N. S. B., & Kamaruzaman, M. N. B. (2019). Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(6), 786-807.
- Muliadi & Amri, K. (2019a). Infrastruktur jalan, belanja modal dan kesempatan kerja: Bukti data panel kabupaten kota di Aceh. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.
- Muliadi & Amri, K. (2019b). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 66-72. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i01.363>.
- Najmi, I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ZIS Terhadap Kemiskinan: Bukti Empiris Data Panel di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 3(1), 25-33.
- Palupi, F. A. D. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 40-51.

- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Raymond. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, 2(3), 14-24.
- Solehah, C. (2017). Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasioanl Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. *Jurnal SAWALA*, 5(2), 23-28.
- Sumarsono, S. (2002). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Makalah Semiloka Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan Depkimpraswil 20-21 Agustus 2002. Jakarta.
- World Bank. (2010). Building Institutions for Market. *World Development Report 2010 (Overview)*.